

PELAKSANAAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMERINTAHAN NAGARI KOTO KACIAK KABUPATEN AGAM

Adella Putri Elfira^{1(a)}, Aldri Frinaldi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}adellaputrielfira09@gmail.com, ^{b)}aldri@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

03-05-2025

Diterbitkan Online:

01-06-2025

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Good Governance, Musyawarah Nagari, Gotong Royong

Keywords:

Community Participation, Nagari Government, Good Governance, Nagari Deliberation, Mutual Cooperation

Corresponding Author:

adellaputrielfira09@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.267>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat pada pemerintahan Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Agam. Pemerintahan nagari sebagai entitas adat memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, khususnya partisipasi. Namun, pelaksanaan prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, dominasi elit lokal dalam musyawarah, serta minimnya keterlibatan generasi muda dan kelompok marjinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan kegiatan gotong royong masih belum optimal. Keterlibatan masyarakat umumnya bersifat konsultatif dan terbatas pada kelompok tertentu. Diperlukan strategi inklusif melalui sosialisasi yang lebih luas, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan peran kelompok perempuan dan pemuda agar partisipasi lebih merata. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, komunikasi, serta pendekatan berbasis budaya untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan nagari secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principle of community participation in the government of Nagari Koto Kaciak, Agam Regency. Nagari government as a customary entity has great potential in implementing the principles of good governance, especially participation. However, the implementation of this principle still faces various obstacles such as low public awareness, the dominance of local elites in deliberations, and the lack of involvement of the younger generation and marginalized groups. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results show that community participation in development planning, decision-making, and gotong royong activities is still not optimal. Community involvement is generally consultative and limited to certain groups. Inclusive strategies are needed through wider socialization, the use of information technology, and strengthening the role of women's and youth groups so that participation is more evenly distributed. This research recommends increasing transparency, communication, and culture-based approaches to encourage active community involvement in sustainable village development.

PENDAHULUAN

Nagari merupakan unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas, memiliki harta kekayaan sendiri, kewenangan untuk memilih pemimpinnya melalui musyawarah, dan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filsafah dan nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) atau sesuai dengan tradisi dan adat istiadat setempat.

Sebagai struktur pemerintahan yang menggantikan sistem desa, nagari terdiri dari beberapa marga (suku) dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan memilih pemimpinnya (Rianda Prima Putri, 2021). Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah merupakan komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang semakin relevan di era modern di mana transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan (Pamungkas et al., 2023; Putra, 2023).

Namun, pelaksanaan pemerintahan nagari seperti di Nagari Koto Kaciak masih menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan tantangan yang dihadapi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Beberapa fungsi pemerintahan yang esensial, seperti pelayanan publik, regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, masih belum dapat dijalankan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kelembagaan, pemanfaatan lingkungan yang kurang mendukung, serta efisiensi dan efektivitas yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan.

Menurut Soedarmayanti (2012:20), United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 mengidentifikasi beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Di antara prinsip-prinsip tersebut, partisipasi merupakan salah satu aspek yang paling penting namun menjadi masalah dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari Koto Kaciak.

Penerapan prinsip partisipasi di Nagari Koto Kaciak menghadapi beberapa kendala. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat merupakan masalah yang dominan. Banyak warga yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, situasi yang diperparah dengan terbatasnya upaya sosialisasi dari pemerintah nagari. Selain itu, partisipasi dalam pertemuan atau kegiatan pemerintah sering kali didominasi oleh kelompok elit atau tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh, sehingga suara-suara masyarakat yang terpinggirkan tidak didengar. Aparat pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mengelola partisipasi masyarakat karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterampilan fasilitasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang dapat memfasilitasi pelibatan masyarakat masih sangat minim, baik dalam hal komunikasi maupun pengumpulan data.

Seperti yang ditekankan oleh Febrianto dan Frinaldi (2023), "Perubahan teknologi menyebabkan pergeseran tuntutan keterampilan dan kaum muda harus mampu mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada risiko seperti ketidakamanan kerja, disrupsi industri, dan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses." Pergeseran ini menggarisbawahi pentingnya membangun sistem tata kelola pemerintahan partisipatif yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang lebih muda.

Dalam perencanaan pembangunan nagari, partisipasi masyarakat masih terbatas. Masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk secara aktif mempengaruhi arah pembangunan, sehingga mengurangi rasa kepemilikan dan akuntabilitas mereka terhadap hasilnya. Keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam perencanaan pembangunan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah, meningkatkan kualitas pembangunan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, dan mendorong kesetaraan akses terhadap sumber daya melalui proses perencanaan yang inklusif.

Partisipasi seharusnya lebih dari sekedar kehadiran fisik dalam pertemuan-pertemuan, tetapi juga mencakup kontribusi ide, umpan balik, dan bahkan penolakan terhadap program yang diusulkan. Namun, tidak semua anggota masyarakat mampu atau mau terlibat.

Partisipasi memungkinkan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka secara langsung dalam program fisik dan non-fisik, dengan mengakui bahwa masyarakatlah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan mereka.

Hal ini terlihat dari lemahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Di Nagari Koto Kaciak, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan semacam itu masih sangat minim. Banyak yang lebih memilih untuk menyumbangkan uang daripada menyumbangkan tenaga, dengan alasan kesibukan kerja atau anggapan bahwa dana desa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun beberapa warga memberikan saran dalam pertemuan yang diakui oleh Wali Nagari, partisipasi aktual tetap rendah.

Partisipasi mengacu pada keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan bersama. Idealnya, partisipasi masyarakat di sebuah nagari meliputi keterlibatan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, di Nagari Koto Kaciak, sikap apatis masyarakat terhadap program-program pemerintah masih menjadi masalah besar.

Soematro (2013:23) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam program pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat memfasilitasi pengawasan publik, meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat legitimasi kebijakan. Partisipasi dipahami sebagai jaminan persamaan hak dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat, terutama di daerah-daerah yang tata kelola pemerintahannya menggunakan kearifan lokal. Sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat adalah contoh utama. Sebagai bentuk pemerintahan tradisional yang unik, nagari memiliki potensi besar untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini semakin didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik. Namun demikian,

seperti yang disoroti oleh Hadi dan Frinaldi (2022), "Kebijakan manajemen kependudukan masih belum sepenuhnya efektif karena sosialisasi yang belum merata, kurangnya komitmen RT terhadap kebijakan tersebut, dan sulitnya memverifikasi keberadaan penduduk yang tidak berdomisili." Hal ini mencerminkan masalah yang sama dalam tata kelola pemerintahan nagari, di mana sosialisasi yang terbatas dan komitmen yang lemah di antara para tokoh masyarakat terus menghambat praktik partisipatif yang sesungguhnya.

Wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan warga setempat, Bapak Indra, pada hari Kamis, 6 Juni 2024, pukul 11.00 WIB wamengungkapkan sebagai berikut: "...Meskipun Nagari Koto Kaciak memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, namun banyak warga yang tidak ikut andil atau berpartisipasi. Misalnya, dalam kerja bakti seperti membersihkan jalan atau memperbaiki jembatan yang rusak, banyak warga yang enggan membantu dengan alasan sudah memiliki pekerjaan. Beberapa bahkan beralasan bahwa sudah ada dana desa yang dialokasikan untuk perbaikan tersebut, sehingga mereka tidak perlu terlibat. Hal ini mengindikasikan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif."

Pembentukan pemerintahan nagari dilaksanakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan tata kelola pemerintahan serta daya saing nagari. Sehingga nagari dapat menjadi garda terdepan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun pada praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan nagari koto kaciak masih belum dapat dikategorikasikan sebagai pemerintah yang partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Berbagai teknik digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Menurut Ahmad (2015), teknik pengumpulan data kualitatif dapat berupa observasi, perekaman, wawancara, sejarah kasus, catatan lapangan dan

dokumentasi lainnya. adapun lokasi penelitiannya adalah di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Informan dari penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* sebanyak enam informan yaitu dua dari perangkat nagari, dua informan dari lembaga adat, dan dua informan masyarakat setempat. Untuk sumber pengumpulan data, penulis menggunakan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder seperti buku, jurnal, laporan, dll. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara melalui wawancara terstruktur. Uji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi, yang jenisnya adalah triangulasi sumber.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi factual mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat pada pemerintahan nagari koto kaciak kabupaten agam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan-temuan penelitian tentang pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat pada pemerintahan Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Agam. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya disusun dalam tiga area fokus utama: partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari, pengambilan keputusan, dan *gotong royong*.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari

Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Nagari Koto Kaciak dilakukan melalui Musyawarah Nagari (Musnag), sebuah forum partisipatif di mana anggota masyarakat dapat mengajukan ide dan mengekspresikan kebutuhan mereka. Menurut Mike Rasyadi, meskipun partisipasi terbuka untuk semua, diskusi sering kali didominasi oleh elit lokal seperti tokoh adat dan perangkat nagari.

Upaya tambahan telah dilakukan untuk melibatkan perempuan dan kelompok tani dengan mengunjungi mereka secara langsung, namun partisipasi yang lebih luas masih terbatas. Nila Hirdayeni, Kasi Pemerintahan, menekankan upaya pemerintah untuk mengumpulkan masukan yang inklusif, terutama dari kelompok-kelompok yang kurang

terwakili. Sementara itu, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Nursal Dt Marun Batuah S.Ip menyatakan bahwa nilai-nilai budaya memandu diskusi pembangunan, dengan para pemimpin adat berusaha keras untuk menjaga keselarasan perencanaan dengan prinsip-prinsip adat.

Dari perspektif masyarakat, beberapa warga seperti Ayurer Imam Marajo mengatakan bahwa

“...Saya merasa bahwa keputusan sering kali sudah dibuat sebelum musyawarah diadakan, sehingga masyarakat hanya menjadi pendengar. Perlu ada transparansi yang lebih baik agar kami merasa lebih memiliki andil dalam pembangunan nagari. Pemerintah nagari harus lebih terbuka dan memberikan penjelasan tentang bagaimana usulan masyarakat dipertimbangkan dalam proses perencanaan” dan David Hendri merasa bahwa pendapat mereka kurang terwakili, karena keputusan yang diambil seringkali dianggap sudah ditentukan sebelumnya. Mereka menyoroti perlunya transparansi dan komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan rasa keterlibatan mereka.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Temuan menunjukkan bahwa meskipun pengambilan keputusan di Nagari Koto Kaciak didasarkan pada musyawarah mufakat, keterlibatan masyarakat secara aktual masih terbatas. Informan dari pemerintah, seperti Petugas Perencanaan dan Kesejahteraan, mengakui bahwa tidak semua anggota masyarakat merasa perlu dilibatkan atau percaya bahwa partisipasi mereka akan berdampak.

Tokoh-tokoh adat, seperti KAN, terus memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ada seruan untuk meningkatkan komunikasi dan inklusivitas untuk memastikan keterwakilan yang lebih luas. Ketua BAMUS (Badan Permusyawaratan), Anryadi, menunjukkan tantangan rendahnya partisipasi pemuda dan menekankan pentingnya program penjangkauan yang tepat sasaran.

Dari sisi masyarakat, baik Ayurer Imam Marajo mengatakan bahwa *“...Kadang kami hanya diberitahu keputusan yang sudah dibuat, tanpa ada kesempatan untuk benar-benar menyuarakan pendapat. Kami berharap ada lebih banyak dialog antara masyarakat dan*

pemerintah nagari sebelum keputusan diambil” dan David Hendri menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya pemberitahuan awal dan kurangnya pengaruh dalam diskusi kebijakan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur pengambilan keputusan partisipatif sudah ada, implementasinya belum sepenuhnya melibatkan semua segmen masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Gotong Royong

Partisipasi dalam gotong royong, atau kerja bakti, masih menjadi tradisi penting di Nagari Koto Kaciak. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya penurunan keterlibatan, terutama di kalangan generasi muda. Menurut Mike Rasyadi kaum muda cenderung memprioritaskan pekerjaan atau pendidikan, yang menyebabkan berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan fisik.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah telah mencoba strategi motivasi, termasuk memberikan penghargaan kepada kontributor aktif, seperti yang dicatat oleh Rusdi. Tokoh adat seperti Nursal memandang *gotong royong* sebagai identitas budaya yang harus dilestarikan. Perwakilan BAMUS juga melaporkan telah melakukan upaya sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan partisipasi.

Meskipun demikian, anggota masyarakat melaporkan adanya tantangan terkait komunikasi dan penjadwalan. Ayurer Imam Marajo mengatakan bahwa “...*Saya ingin selalu ikut dalam gotong-royong, tetapi sering kali jadwalnya tidak sesuai dengan kesibukan saya. Jika ada sistem pengumuman yang lebih baik dan jadwal yang lebih fleksibel, saya yakin lebih banyak masyarakat yang akan ikut serta*” menyebutkan kesulitan untuk menghadiri kegiatan karena konflik waktu, sementara David Hendri menekankan perlunya insentif atau hasil yang lebih nyata untuk mendorong keterlibatan.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah Pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat di Nagari Koto Kaciak Kabupaten Agam masih dalam tahap pengembangan dan belum mencapai potensi maksimal. Meskipun ruang-ruang partisipatif seperti Musyawarah Nagari (Musnag) telah tersedia, keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh adat dan

pejabat pemerintah. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat umum belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan nagari, pengambilan keputusan, dan *gotong royong*. Beberapa faktor penghambat diidentifikasi, termasuk terbatasnya akses informasi, kurangnya kesadaran partisipatif, kurangnya pemahaman tentang mekanisme tata kelola pemerintahan, dan dominasi elit lokal.

Namun demikian, nilai-nilai gotong royong dan diskusi kolektif tetap mengakar kuat dalam kehidupan sosial Nagari Koto Kaciak, yang mencerminkan tradisi budaya yang kuat. Namun, nilai-nilai ini harus dikontekstualisasikan kembali dengan pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan modern agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Penguatan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang adil dan keberhasilan realisasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan di tingkat nagari, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan. Pertama, pemerintah Nagari Koto Kaciak perlu meningkatkan upaya pendidikan dan penjangkauan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan di setiap *orong* (wilayah desa) untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi. Kedua, integrasi teknologi informasi seperti media sosial, grup WhatsApp, atau aplikasi khusus masyarakat dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, mengumpulkan masukan dari masyarakat, dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat berpenghasilan rendah, harus diberdayakan secara aktif dan diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui forum-forum khusus atau undangan khusus. Keempat, semangat *gotong royong* harus direvitalisasi melalui inisiatif-inisiatif kreatif, seperti mengintegrasikan kerja bakti dengan acara-acara budaya atau rekreasi, atau dengan memberikan penghargaan simbolis atau dukungan logistik.. Terakhir, penelitian

lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi strategi yang lebih mendalam untuk meningkatkan partisipasi berdasarkan kearifan lokal dan untuk menilai efektivitas alat digital dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif di tingkat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. *MIS Quarterly*, 107–136. 10.2307/3250961
- Chuang, S.-H., & Lin, H.-N. (2013). The roles of infrastructure capability and customer orientation in enhancing customer-information quality in CRM systems: Empirical evidence from Taiwan. *International Journal of Information Management*, 33(2), 271–281. 10.1016/j.ijinfomgt.2012.11.002
- Chang, H. H., & Chuang, S. S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. *Information & Management*, 48(1), 9–18. 10.1016/j.im.2010.11.001
- Garrido-Moreno, A., Lockett, N., & García-Morales, V. (2014). Paving the way for CRM success: The mediating role of knowledge management and organizational commitment. *Information & Management*, 51(8), 1031–1042. 10.1016/j.im.2014.07.003
- Nguyen, B., Simkin, L., & Canhoto, A. I. (2020). The dark side of digital personalization: An agenda for research and practice. *Journal of Business Research*, 116, 209–221. 10.1016/j.jbusres.2020.05.043
- Reichheld, F. F., & Scheffer, P. (2000). E-loyalty: Your secret weapon on the web. *Harvard Business Review*, 78(4), 105–113.
- Zablah, A. R., Bellenger, D. N., & Johnston, W. J. (2004). An evaluation of divergent perspectives on customer relationship management: Towards a common understanding of an emerging phenomenon. *Industrial Marketing Management*, 33(6), 475–489. 10.1016/j.indmarman.2004.01.006
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Revisi ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1 (13th ed.). Jakarta: Erlangga.